

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Administrasi Kota Mataram

Kota Mataram merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Pulau Lombok. Kota Mataram ini diapit oleh Kabupaten Lombok Barat yang merupakan perbatasan langsung pada arah utara, timur, dan selatan sementara pada arah barat Kota Mataram dibatasi oleh Selat Lombok. Berikut akan dijelaskan terkait kondisi geografis serta administrasi Kota Mataram secara lengkap.

1. Kondisi Geografis

Keberadaan Kota Mataram sebagai Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk utama yang bersebrangan dengan Selat Lombok sebagai penghubung antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Secara geografis Kota Mataram terletak disebelah barat Pulau Lombok, letaknya diapit oleh kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok.

Letak Kota Mataram Secara geografis Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok dan secara astronomis terletak pada posisi $116^{\circ}04'$ - $116^{\circ}10'$ Bujur Timur, dan $08^{\circ}33'$ - $08^{\circ}38'$ Lintang Selatan dengan panjang garis pantai 9 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Batas-Batas Wilayah Kota Mataram

No.	Arah	Batas Wilayah
1.	Utara	Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
2.	Selatan	Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat
3.	Barat	Selat Lombok
4.	Timur	Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram 2015

Secara topografis Kota Mataram merupakan dataran rendah, sedang dan sisanya sebelah utara merupakan dataran pegunungan dan perbukitan. Kota Mataram berada pada posisi 50 meter dibawah permukaan laut (dpl) sehingga sebagian besar wilayahnya berupa hamparan datar.

Ketinggian tanah bervariasi di kecamatan Cakranegara ketinggian tanah berkisar 25 meter, sementara di kecamatan Mataram sekitar 15 meter, dan di kecamatan Ampenan sekitar 5 meter dari permukaan laut sehingga termasuk daerah pantai. Bagian selatan Kota Mataram mempunyai topografi yang relatif rendah sehingga pada musim penghujan sering tergenang air.

2. Kondisi Administrasi

Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB terletak di Pulau Lombok. Awal terbentuknya Kota Mataram ditandai dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram. Kemudian berubah status menjadi Kotamadya Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 dengan luas

wilayah 61,30 km² (6.130 Ha) dan 56,80 km² perairan laut serta garis pantai sepanjang 9 km. Luas wilayah Kota Mataram tersebut hanya 0,30 persen dari luas Provinsi NTB secara keseluruhan yaitu 20.153,15 km², sehingga menjadikan Kota Mataram sebagai kota dengan wilayah terkecil dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB.

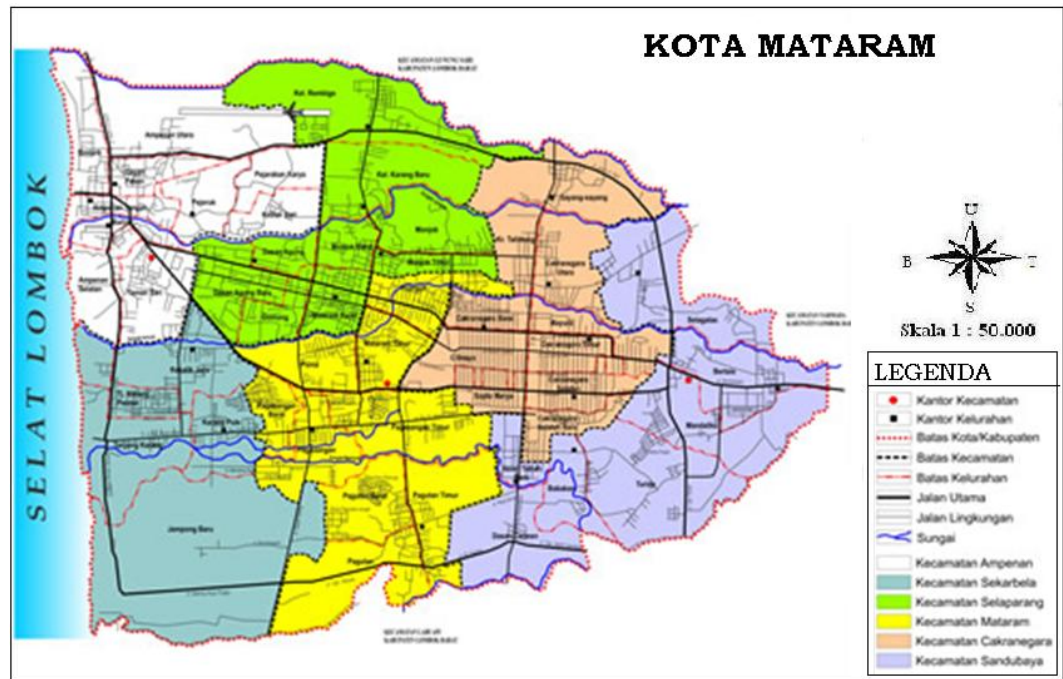
Pada 2007 Kota Mataram mengalami pemekaran wilayah dari tiga kecamatan dan 23 kelurahan menjadi enam kecamatan dan 50 kelurahan dan 325 lingkungan. Secara administrasi wilayah Kota Mataram adalah 61,30 Km² yang terbagi dalam 6 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 10,77 Km², disusul kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,76 Km². Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,46 Km². Selengkapnya luas masing-masing wilayah kecamatan di Kota Mataram sebagai berikut:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Ampenan	946	15,43
2.	Sekarbela	1.032	16,84
3.	Mataram	1.076	17,55
4.	Selaparang	1.077	17,57
5.	Cakranegara	967	15,77
6.	Sandubaya	1.032	16,84
Jumlah		6.130	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram 2015

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram



Sumber : <http://www.mataramkota.go.id/>

Sebagai Ibukota provinsi, pola guna lahan di Kota Mataram dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan pola linear terjadi karena tata guna lahan mengikuti pola jaringan jalan seperti pada koridor utama Kota Mataram di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya. Perkembangan guna lahan secara konsentrik yang berbentuk grid (mengelompok) seperti yang tersebar di Kawasan Cakranegara dan sekitarnya. Sedangkan, pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di kelurahan Rembiga, Sayang-Sayang di bagian utara, Kelurahan Jempong Baru, Pagutan, dan pusat pemukiman di Kawasan Bertais. Pada pola linear, konsentrik, dan parsial tersebut terjadi penyatuan guna lahan, sehingga terbentuklah kawasan terbangun yang telah berkembang seperti saat ini.

Dalam perkembangannya konversi lahan sebagian besar untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini terjadi karena semakin pesatnya dinamika pertumbuhan dan perkembangan Kota yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk perkembangannya. Penggunaan lahan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Menurut kesesuaian dengan RUTR (Ha)

No.	Penggunaan lahan	Luas Lahan (Ha)			
		2012	2013	2014	2015
1.	Perumahan	2.352,18	2.401,12	2.414,48	2.426,64
2.	Lapangan Olahraga	46,10	46,10	46,10	46,10
3.	Kuburan	51,64	51,64	51,64	51,64
4.	Perkantoran	115,45	115,45	115,45	116,13
5.	Pendidikan	151,82	151,82	151,82	152,47
6.	Kesehatan	23,37	23,37	23,37	23,62
7.	Ibadah	63,33	63,33	63,33	63,33
8.	Jasa	0,26	0,26	0,38	0,38
9.	Pasar/terminal	68,35	68,35	68,35	68,35
10.	Pertokoan/SPBU	101,98	102,78	104,57	104,98
11.	Warung/rumah makan	1,06	1,55	1,55	1,55
12.	Hotel	18,91	18,91	18,91	19,22

13.	Pergudangan	50,60	52,24	52,24	2,39
14.	Industri dan jasa	51,75	51,75	51,75	51,75
15.	Taman kota	6,07	6,07	6,07	6,07
16.	Tanah diperuntukan	125,82	125,88	129,88	129,88
17.	Tanah pertanian	2.819,42	2.763,49	2.748,22	2.733,62
18.	Tanah tidak diusahakan	81,89	81,89	81,89	81,89
Kota Mataram		6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00

Sumber: BPS Kota Mataram dan BPN Kota Mataram, 2016

Neraca perubahan penggunaan lahan di Kota Mataram tahun 2015 antara lain luas perubahan pada perumahan mengalami peningkatan sebesar 12,164 di tahun 2015 untuk perkantoran terjadi peningkatan sebesar 0,68 begitu juga untuk pendidikan mengalami peningkatan sebesar 0,65 dan yang paling signifikan terjadi pengurangan di tahun 2015 ini adalah di jenis penggunaan tanah pertanian berkurang sebesar 114,59.

B. Kondisi Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram tahun 2015, jumlah penduduk Kota Mataram tercatat 450.226 jiwa. Jumlah penduduk

perempuan lebih besar dibanding penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk perempuan terhadap jumlah penduduk laki-laki) yaitu sebesar 98 persen.

Penduduk Kota Mataram masih hanya berwilayah disatu lokasi belum menyebar secara merata di seluruh wilayah. Umumnya, penduduk banyak bermukim di Kecamatan Ampenan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Kota Mataram tercatat 7.345 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu Kecamatan Ampenan dengan kepadatan 9.275 orang setiap kilometer persegi.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Menurut Kecamatan Di Kota Mataram Tahun 2014 – 2015.

Kecamatan	Jumlah penduduk		Pertumbuhan (%)
	2014	2015	
Ampenan	86 052	87 746	1,97
Sekarbela	62 508	64 946	3,90
Mataram	81 450	83 479	2,49
Selaparang	74 513	74 795	0,38
Cakranegara	66 516	66 983	0,70
Sandubaya	70 025	72 277	3,22
Jumlah	441 064	450 226	2,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Sedangkan jumlah penduduk menurut agama pada tahun 2015 di Kota Mataram berjumlah 418.679 orang dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah penduduk 353.617 orang. Jumlah penduduk menurut agama di Kota Mataram yang paling minoritas adalah Budha/lainnya dengan jumlah 2.815 orang.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Kota Mataram Menurut Agama dan Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Penduduk Menurut Agama (Orang) tahun 2015				
	Islam	Nasrani	Hindu	Buddha/lainnya	Jumlah
Ampenan	85 740	3 194	2 044	1 085	92 063
Sekarbela	48 112	1 475	2 485	602	52 684
Mataram	54 712	1 112	15 176	153	71 153
Selaparang	67 706	802	6 079	270	74 857
Cakranegara	41 121	1 342	21 120	0	63 583
Sandubaya	56 216	1 342	6 076	705	64 339
Jumlah	353 617	9 267	52 980	2 815	418 679

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Proporsi penduduk berdasar agama termasuk merata penyebarannya pada tiap-tiap kecamatan jika dilihat berdasarkan jumlah pemeluk agama, seperti ditunjukkan pada tabel diatas. Sedangkan komposisi penduduk Kota Mataram menurut penduduk asli, pendatang, asal daerah dan etnis tergolong heterogen, terdiri dari berbagai suku daerah, etnis dan golongan masyarakat yang hidup dalam kerukunan, keharmonisan dan saling toleransi. Tidak ada keterangan

tentang jumlah yang pasti terhadap komposisi tersebut, namun yang dominan adalah suku Sasak, Samawa, Mbojo, Bugis dan Bali serta etnis Melayu, Arab dan Tionghoa selebihnya adalah dari Jawa, Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (Buku Putih Sanitasi Kota Mataram, 2010: 29).

C. Kondisi Sosial Politik Kota Mataram

Sejak ditetapkannya Kota Mataram sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Desember 1985, terdapat 4 orang walikota yang menjabat sebagai kepala daerah tingkat II dibawah Gubernur. Walikota Mataram yang pertama adalah Drs. H.L. Mujitahid (periode 1978 s/d 1989), Walikota Mataram yang kedua adalah H. Lalu Mas'ud (periode 1989 s/d 1999), Walikota Mataram yang ketiga adalah H. Moh.Ruslan (periode 1999 s/d 2015) yang kemudian dilanjutkan pada periode 2005 s/d 2010. Walikota Mataram yang terakhir adalah H. Ahyar Abduh pada periode 2010 s/d 2015 yang dilanjutkan dan diangkat menjadi Walikota pada periode 2016 s/d 2021.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi umum Kota Mataram saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah **“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”**. Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Visi tersebut merupakan satu kesatuan konsep yang memiliki nilai yang tak terpisahkan, sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

visi tersebut mengandung arti bahwa Kota Mataram yang ingin diwujudkan dalam lima tahun kedepan, adalah kota yang memiliki masyarakat maju, religius, dan berbudaya.

1. Maju mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat *Gumi Mentaram* yang sejahtera. Kemajuan ini dapat diukur berdasarkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Religius mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan kualitas masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang tinggi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. Nilai-nilai religius menjadi *spirit* dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
3. Berbudaya mengandung makna dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki keseimbangan antara

kemajuan dan religiusitas yang saling menerima dalam kemajemukan, menguatnya identitas dan karakter masyarakat yang mandiri, bermoral dan bermartabat. Masyarakat berbudaya tidak hanya dapat dilihat dari berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada berkembangnya infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal.

Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”, maka Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu :

1. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.